

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PPKM DARURAT
TERHADAP KOMUNITAS PEDAGANG BESI TUA DI PASAR
SETONO BETEK KOTA KEDIRI**

(Periode 03 Juli – 20 Juli 2021)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



Disusun Oleh

ANANDA OCTAVIAN SASQIA PUTRI

NIM 2018020045

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR.SOETOMO SURABAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PPKM DARURAT TERHADAP
KOMUNITAS PEDAGANG BESI TUA DI PASAR SETONO BETEK KOTA
KEDIRI (Periode 3 Juli-20 Juli 2021)**

Disusun Oleh

ANANDA OCTAVIAN SASQIA PUTRI

2018020045

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji dan dinyatakan Telah
memenuhi syarat untuk diterima
Program Studi Administrasi Negara**

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

2022

Menyetujui, 18 Februari 2022

Pembimbing

SRI ROEKMINIATI, S.Sos, M.Kp

NIP . 94 . 01 . 1 .165

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PPKM DARURAT TERHADAP KOMUNITAS PEDAGANG BESI TUA DI PASAR SETONO BETEK KOTA KEDIRI

(Periode 03 Juli – 20 Juli 2021)

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji dan
dinyatakan Telah memenuhi syarat untuk diterima Susunan Dewan
Penguji**

Penguji I : Sri Roekminiati, S.Sos, M.KP

Penguji II : Dra. Sri Kamariyah, M.Si

Penguji III : Drs. Basuki Nugroho, M.Si

**Surabaya, 18 Februari 2022
Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan,**

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd

NIP/NPP : 195 21112 1981032 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Februari 2022

Mahasiswa,

Ananda Octavian Sasqia Putri
2018020045

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	1
ABSTRAK	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II PENELITIAN TERDAHULU	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kebijakan Publik.....	18
2.4 Evaluasi Substantive atau Evaluasi Dampak.....	31
2.5 Tentang Pasar Tradisional.....	33
2.6 Definisi PPKM Darurat.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Fokus Penelitian.....	44
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Informan.....	46
3.5 Sumber Data.....	47
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	47

3.7	Teknis Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Deskripsi Pasar Setono Betek Kota Kediri	53
4.2	Hasil Temuan Penelitian	58
4.2	Aktivitas Kegiatan di Pasar Setono Betek selama PPKM Darurat	59
4.4	Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat Terhadap Komunitas Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri	63
4.5	Upaya pemenuhan kebutuhan dasar para Pedagang Besi di Pasar Setono betek Kota Kediri ditengah penutupan Pasar Besi.....	77
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.4	Tabel Informan	43
Tabel 4.1	Jam Operasional Pasar Setono Betek Kota Kediri	52
Tabel 4.2	Umur , Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.7	Proses Analisis Data Kualitatif	47
Gambar 4.3	Kondisi Pasar Besi saat penerapan PPKM Darurat berlangsung.....	59
Gambar 4.4	Diagram Pendapatan Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri Sebelum dan Selama PPKM Darurat.....	62

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul *“Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap Komunitas Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri”*. Penyusunan artikel ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penyusunan artikel ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. Keberhasilan penyusunan artikel ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. , selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

3. Ibu Sri Roekminiati. S.sos, M.KP. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah sabar memberikan arahan,kritik dan saran dalam kepada saya demi terselesaikannya skripsi saya.
4. Ibu Dra. Sri Kamariyah, M.Si dan Bapak Drs. Basuki Nugroho, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Dosen jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara, yang telah berkenan memberikan ilmunya,mengajar dengan baik kepada penulis sampai detik ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan support penuh kepada saya sampai saat ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
7. Kepada kakak tingkat yang telah memberikan memberikan informasi yang berguna untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk memberikan informasi demi tersusunnya skripsi ini dengan baik.
9. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha dan bertanggung jawab menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Akhir kata ,Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna,oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan masih sangat diperlukan oleh penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis

Ananda Octavian Sasqia Putri

ABSTRAK

Terjadinya *Second Wave* (Gelombang Kedua) Pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Kebijakan PPKM Darurat. Suatu kebijakan pasti berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti halnya para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Berdasarkan aturan PPKM Darurat yang mengatur bahwa pedagang di sektor Non Esensial diharuskan 100% *WFH* (*Work From Home*) Secara otomatis juga, para pedagang besi ini harus taat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana dampak PPKM Darurat terhadap kehidupan para pedagang besi yang harus menutup kios mereka selama dua minggu sesuai aturan yang berlaku. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari beberapa para pedagang besi dan pihak pengelola pasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi lapangan, dan studi pustaka. Teknis Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode interaktif melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan PPKM Darurat sangat berdampak pada kehidupan para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Dampak yang paling besar dirasakan oleh para pedagang besi ini adalah di sektor ekonomi, sektor sosial dan dampak psikologis. Di sektor ekonomi, berdasarkan data peneliti hampir 90% income atau penghasilan mereka menurun drastis. Hal ini disebabkan karena penutupan area blok Pasar Besi yang membuat mereka tidak bisa berjualan seperti biasanya. Meskipun mereka masih bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi jual beli, namun tetap saja pada dasarnya para pedagang besi ini tergolong pedagang tradisional yang sistem transaksi jual belinya yang masih konvensional, alhasil masih sulit bagi mereka berdagang secara online ataupun lewat media sosial. Dari sektor sosial pun para pedagang ini juga mengalami dampak yang lebih kompleks, salah satunya adalah Perubahan Sistem Sosial terlihat dari sistem interaksi sosial antara pedagang dan pembeli di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang biasanya dilakukan secara langsung, melakukan kegiatan jual beli secara langsung, tidak bisa dilakukan.

Dan dari sektor psikologis, tuntutan untuk bekerja dari rumah memicu kebosanan dan kejenuhan yang memicu stres para pedagang besi ini. Berdasarkan hasil yang telah di deskripsikan, rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada pemerintah bisa mengkaji aturannya untuk lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terlebih kepada masyarakat pekerja harian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir dampak yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Dampak PPKM Darurat.

ABSTRACT

The occurrence the Second Wave of the Covid-19 pandemic made the Indonesian government issue a new policy called the PPKM Darurat Policy. Various measures and policies taken by the government to overcome this virus are also many, although the results cannot be said to be maximal or make this virus disappear. A policy will definitely have an impact on people's lives, such as scrap metal traders at the Setono Betek Market, Kediri City. Based on the Emergency PPKM rules which stipulate that traders in the Non-Essential sector are required to 100% WFH (Work From Home) or the term work at home, the manager of the Setono Betek Market in Kediri City temporarily closed the Pasar Besi block for two weeks, namely the period 03 July-20 July 2021. Automatically, these iron traders must obey the rules made by the government. This research was conducted with the aim of knowing how the impact of Emergency PPKM on the lives of iron traders who had to close their stalls for two weeks according to the applicable regulations Source of data taken in this study came from several traders iron and market managers. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. With data collection methods through interviews, documentation, field studies, and literature studies. Technical data analysis in this study uses interactive methods through data reduction, data presentation, and withdrawal. conclusion. The results of this study indicate that the Emergency PPKM regulations greatly impact the lives of iron traders in the Setono Betek Market, Kediri City.

The biggest impact felt by these iron traders is in the economic sector, social sector and psychological impact. almost 90% of their income or income has decreased drastically. This is due to the closure of the Pasar Besi block area which makes them unable to sell as usual. Even though they can still use social media as a means of buying and selling transactions, basically these iron traders classified as traditional traders whose buying and selling transaction systems are still conventional, as a result it is still difficult for them to trade online or via social media. Even from the social sector, these traders also experience more complex impacts, one of which is Changes in the Social System seen from the interaction system. social relations between traders and buyers in Pasa r Setono Betek of Kediri City, which is usually carried out directly, carrying out direct buying and selling activities, cannot be carried out.

And from the psychological sector, the demand to work from home triggers boredom and boredom that triggers stress for these iron traders. pay attention to the impact on the community, especially to the daily worker community. This is done as an effort to minimize the impact that occurs in the community. Because basically not all work can be done through *WFH (Work From Home)*.

Keywords: Policy Evaluation, Impact of PPKM Darurat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di seluruh dunia sedang diguncang oleh wabah pandemi yaitu Corona *Virus Disease* (COVID-19). Virus ini merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan manusia. Pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit *SARS* dan *MERS*, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Virus ini bersifat *Zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan *Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan “*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (pemberitahuan mendesak tentang pengobatan pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui). Covid-19 ini mulanya mewabah di Wuhan pada akhir Desember 2019. Kemudian menjalar di seluruh provinsi di negara China, dalam waktu kurang lebih dua bulan telah menimbulkan kasus 80 ribu dan 3.000 kematian. Selanjutnya, barulah virus ini menyebar ke negara terdekat China lalu meluas ke seluruh dunia.

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona.

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa berbagai dampak di segala sektor termasuk di negara Indonesia. Wabah ini telah menyebabkan lebih dari 250 ribu warga meninggal dunia di rumah sakit di kawasan Asia, Amerika, Australia, Afrika, Eropa dan Antartika. Karena penyebaran virus ini sangat cepat, maka dari itu negara-negara yang terdampak berbondong-bondong melakukan upaya untuk mengatasi virus ini mulai dari membuat kebijakan yang mengatur mobilitas kegiatan warga negara, melakukan vaksinasi dan lain-lain. Pandemi Covid-19 berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, *WHO (World Health Organization)* telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang melibatkan kerumunan.

Virus Covid-19 ini juga masuk ke wilayah Indonesia. Kasus pertama terjadi pada Senin 2 Maret 2020 di wilayah DKI Jakarta. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan usia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Setelah kasus pertama tersebut, wabah virus ini mulai menyebar ke seluruh Indonesia dan terjadi peningkatan orang yang positif terjangkit secara terus menerus. Sejak saat itu pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah tindakan dan upaya untuk menekan penyebaran secara meluas Virus Corona ini. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan

dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara.

Pemerintah Indonesia juga tidak tinggal dalam menghadapi pandemi ini pasca ada kasus pertama pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 . Berkaitan dengan langkah itu, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Langkah Strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhano Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi, salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat dalam menghadapi Covid-19 melalui deklarasi nasional. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikuatkan dengan siaran pers Presiden RI di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan Social Distancing demi mencegah penularan Covid-19. Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi

wilayah terdampak virus paling tinggi. Setelah itu barulah diikuti provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Selama beberapa bulan, masyarakat mengalami aturan Kebijakan PSBB ini.

Pada bulan Juli 2021, Pemerintah Indonesia kembali menerapkan Kebijakan yang hampir sama dengan pelaksanaan PSBB, yaitu PPKM Darurat. Istilah ini dilakukan sebagai wujud upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang saat ini sedang mengalami *Second Wave* (Gelombang Kedua) Pandemi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Inmendagri yang ditandatangani Tito pada tanggal 2 Juli 2021 ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Peraturan ini juga untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, mengenai PPKM Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Seluruh kegiatan masyarakat yang melibatkan mobilitas tinggi atau kerumunan, tidak diperkenankan untuk dilakukan.

Adanya beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 ini juga pasti memberikan dampak di masyarakat. Dimulai dari dampak di dunia pendidikan yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, hal ini memberikan efek bagi guru, pelajar serta mahasiswa. Memang dalam segi waktu, pembelajaran online lebih efektif dan efisien. Namun penyerapan pemahaman ilmu yang dipelajari memang lebih mudah diajarkan secara langsung, apalagi untuk mahasiswa yang masuk di jurusan yang membutuhkan kegiatan praktek lebih banyak di perkuliahan mereka. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta.

Tidak hanya sektor pendidikan dan pariwisata serta kesehatan saja yang merasakan dampak akibat kebijakan yang diberlakukan ini, hampir seluruh sektor mengalami kerugian. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat apalagi dalam segi ekonomi. Bertambahnya pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di perusahaan-perusahaan, terjadinya Panic Buying (pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut berlebih) di masyarakat.

Penyebaran virus Corona juga berdampak sangat signifikan di Kota Kediri. Pemberlakuan pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat dilaksanakan cukup ketat di kota ini. Salah satu aturan yang dibuat untuk mengurangi mobilitas kegiatan masyarakat kota Kediri adalah mematikan lampu jalan di beberapa titik jalan utama di Kota Kediri. Secara otomatis jalanan gelap, dan membuat para pedagang makanan yang berjualan di malam hari menjadi sepi dan masyarakat dihimbau untuk dirumah. Dampak akibat kebijakan ini seperti rantai yang saling terhubung satu sama lain. Tidak terkecuali mereka para pedagang yang mengadu nasib di Pasar Tradisional. Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan sampai ada yang melakukan karantina parsial sehingga banyak pedagang yang merugi karena pembeli sangat jarang bahkan tak ada. Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski dengan resiko ditertibkan. Hal itu, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian.

Hal yang sama terjadi di Pasar Tradisional Setono Betek Kota Kediri. Pasar ini merupakan pasar terbesar yang ada di Kota Kediri. Dibangun sejak 1982, ribuan pedagang menggantungkan ekonomi di pasar ini. Berbagai jenis barang dijual disini, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan hewan peliharaan bahkan kebutuhan material bangunan. Mewabahnya Pandemi Covid-19 ini, sangat berdampak pada pendapatan mereka. Begitu juga dengan adanya Kebijakan PPKM Darurat yang

dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu yang paling berdampak adalah para Pedagang Besi Tua yang ada di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Mereka harus taat kepada kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak PD Pasar Kota Kediri untuk menutup sementara blok Pasar Besi selama 2 minggu sebagai upaya penerapan kebijakan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Hal ini dikarenakan sesuai instruksi berlaku yaitu *100% WFH (Work From Home)* untuk sektor Non Esensial (terkait bisnis dan tidak menyediakan bahan makanan). Karena blok Pasar Besi merupakan sektor Non Esensial, sesuai aturan yang berlaku, tidak diperbolehkan untuk beroperasi di dalam pasar terlebih dahulu.

Jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Setono Betek Kota Kediri sejumlah 1.438 yang terdiri dari dua golongan, meliputi Pedagang Esensial yaitu pedagang yang menjual kebutuhan pokok seperti sayur mayur, pakaian, bahan sembako, daging dan kebutuhan pokok terdiri dari 1.375 pedagang. Sedangkan Pedagang Non Esensial yaitu pedagang yang tidak menjual kebutuhan pokok seperti kebutuhan onderdil kendaraan, kebutuhan material, dan besi yang terdiri dari 63 pedagang. Jumlah pedagang yang banyak inilah yang menjadi alasan mengapa Pasar Setono Betek Kota Kediri merupakan pasar terbesar di Kota Kediri

Dalam hal ini blok Pedagang Besi Tua merupakan golongan Non Esensial, sesuai instruksi yang berlaku untuk *WFH (Work From Home) 100%*, secara otomatis para pedagang besi terpaksa harus mengikuti aturan yang berlaku untuk tidak diperbolehkan berjualan di dalam pasar selama PPKM Darurat ini dijalankan. Hal ini sangat

berdampak pada penghasilan para pedagang di blok pasar besi ini, mengingat mereka adalah para pekerja harian. Dan selama dua minggu lamanya, para pedagang besi ini terpaksa mengikuti aturan yang berlaku. Ada total keseluruhan pedagang besi tua yaitu sebanyak 63 pedagang yang terdiri dari 60 pedagang yang masih aktif (masih beroperasi atau berjualan) dan 3 pedagang yang sudah tidak aktif (tidak beroperasi atau berjualan). Dan sesuai aturan yang berlaku, 60 pedagang yang masih aktif ini harus mengikuti yang dibuat oleh pemerintah dimana mereka harus WFH 100% (Work From Home) dan tidak boleh bekerja di dalam Pasar Setono Betek. Terhitung aturan PPKM Darurat ini berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Pelaksanaan ini diterapkan oleh pihak PD Pasar Setono Betek Kota Kediri sebagai bentuk mengikuti aturan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Virus Covid-19 melalui Kebijakan PPKM Darurat.

Sebuah kebijakan yang dibuat pasti akan berdampak, baik itu berdampak positif maupun negatif. Seperti halnya kebijakan PPKM Darurat ini berdampak pada komunitas pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Peneliti mengambil 1 titik fokus yang dijadikan fokus penelitian terhadap komunitas Pedagang Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang dirasa efektif untuk dijadikan sebuah penelitian. Karena pada kenyataannya komunitas pedagang besi di pasar ini adalah yang paling terdampak dibandingkan para pedagang lain. Hal ini dikarenakan sesuai aturan yang berlaku mereka tidak diberi akses untuk berjualan di dalam pasar selama 2 minggu lebih lamanya. Seperti yang diketahui bahwa para pedagang besi tua ini merupakan pekerja harian, dimana berdagang besi tua adalah penghasilan utama

mereka. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat Terhadap Komunitas Pedagang Pasar Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap Komunitas pedagang Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang dalam hal ini tidak diberikan ijin akses sementara untuk berdagang di dalam Pasar Setono Betek Kota Kediri?
- 2) Apa upaya yang dilakukan oleh para pedagang besi tua agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah penutupan pasar besi karena adanya kebijakan PPKM Darurat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendeskripsikan dampak yang dialami oleh masyarakat khususnya bagi para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang tidak bisa berjualan di dalam pasar akibat PPKM Darurat.
- 2) Mendeskripsikan apakah hasil dari kebijakan ini sudah sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Bagi peneliti, mampu mengaplikasikan Ilmu Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang diperoleh dalam perkuliahan.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat tentang pengaruh penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap pedagang di pasar tradisional.
- c) Bagi Pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian beberapa variabel yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap pedagang di pasar tradisional.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya peneliti ini mengutip di penelitian terdahulu yang serupa tetapi memiliki penjelasan yang berbeda. Agar tidak terjadi kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, perbedaan tersebut akan menjadi penyatuan satu ilmu pengetahuan dari beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Rizky Nur,Ismi,Rizky P,Wahyu dan Shafa (2020)	Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri (AZIMAH et al., 2020)	Berdasarkan dari 15 sampel yang di ambil dari Pasar Klepu, Pasar Kalikotes dan Pasar Kota Wonogiri, pandemi Covid-19 telah membuat kerugian dalam bidang ekonomi maupun sosial, pemahaman masyarakat di Kabupaten Klaten dan Wonogiri mengenai apa itu virus juga tidak luas, masyarakat hanya mengetahui virus corona itu adalah virus yang menyerang pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia lainnya melalui percikan air liur atau droplet. Hasil dari 15 sampel tersebut dengan adanya penerapan PSBB di wilayah membuat warga yang berjualan di pasar mengalami kerugian, contoh; seharusnya warga bisa menjual dagangannya lebih banyak sebelum pandemi Covid-19 akan tetapi

			dengan adanya pandemi ini penjualan semakin menurun dan rugi, tidak hanya itu, pedagang juga tidak bisa balik modal.
2.	Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah. (2020)	Dampak Social Distancing terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura pada Era Pandemi Corona. (Christina Purbawati et al., 2020)	Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pembatasan sosial (social distancing) yang diberlakukan Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pembatasan sosial (social distancing) yang diberlakukan oleh pemerintah yang juga berlaku bagi para pedagang di Pasar Tradisional Kartasura ternyata berdampak pada kondisi pasar yang sepi pembeli, daya beli masyarakat yang menurun akibat tidak diperbolehkannya penyelenggaraan acara yang mengundang banyak orang sehingga pembeli hanya berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari saja, dan distribusi bahan yang terhambat pengirimannya. Adapun langkah-langkah yang telah diambil para pedagang di Pasar Tradisional Kartasura agar tetap dapat berjualan setiap harinya yaitu mengurangi jumlah barang dagangannya baik itu pedagang sayur maupun pedagang daging, melakukan penurunan harga agar barang dagangannya tetap laku terjual, dan adapula yang beralih profesi yang semula pemilik katering menjadi penjual buah
3.	Ilham Putra Sahbana, Juliani Pudjowati, Susi Tri Wahyuni (2020)	Analisis Dampak Situasi Pandemi Covid-19 terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Larangan di Sidoarjo (Sahbana et al., 2021)	Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar, pendapatan pedagang menjadi menurun. Penurunan pendapatan ini juga sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup pedagang. Pedagang yang kehabisan modal tidak dapat melanjutkan usahanya dan akhirnya bisa gulung tikar.

1. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nur,Ismi,Rizky Pratama, Wahyu dan Shafa

Metode Penelitian yang dipakai oleh penelitian ini adalah Kualitatif sedangkan Metode Peneelitan yang digunakan oleh Rizky Nur,Isimi,Rizky Pratama,Wahyu dan Shafa menggunakan metode penelitian Kuantitatif.Lokasi Penelitian ini berada di Pasar Setono Betek Kota Kediri,seandainya penelitian dilakukan oleh Rizky Nur,Ismi,Rizky Pratama, Wahyu dan Shafa berada di Klaten dan Wonogiri.Fokus penelitian ini adalah dampak kebijakan PPKM Darurat terhadap pedagang tradisional ,khususnya Non Esensial.Sedangkan focus penelitian milik Rizky Nur,Ismi,Rizky Pratama,Wahyu berfokus pada aspek ekonomi dan social akibat situasi pandemic Covid -19.

2. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina Purbawati,Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah.

Topik penelitian ini berfokus pada Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap komunitas pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri,seandainya penelitian yang dilakukan oleh Christina Purbawati,Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah. berfokus pada penerapan ‘‘Social Distancing’’ bagi pedagang di pasar tradisional Kartasura.Lokasi Penelitian berada di Pasar Setono Betek Kota Kediri,seandainya penelitian dilakukan oleh Christina Purbawati ,Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah.berada di Pasar Kartasura,Solo Jawa Tengah.

1) Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Putra Sahbana, Juliani Pudjowati, Susi Tri Wahyuni

Topik penelitian ini berfokus pada Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap komunitas pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Putra Sahbana, Juliani Pudjowati, Susi Tri Wahyuni berfokus pada tingkat kesejahteraan para pedagang di Pasar Larangan akibat situasi pandemic Covid 19. Lokasi Penelitian berada di Pasar Setono Betek Kota Kediri, sedangkan penelitian dilakukan oleh Ilham Putra Sahbana, Juliani Pudjowati, Susi Tri Wahyuni berada di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Seperti halnya yang tertera dalam jurnal milik^(Normajatun1, 2020) bahwa Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) dampak atau outcomes. Selain membahas apa itu kebijakan publik dan unsur-unsurnya, bab ini juga memaparkan pandangan filsafati tentang kebijakan publik serta tujuan kebijakan publik.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Dalam kebijakan publik sendiri terdapat beberapa proses perumusan produk kebijakan. Dengan kata lain, bahwa seluruh kebijakan publik yang berlaku saat ini telah melalui tahapan-tahapan proses panjang guna memastikan produk kebijakan yang ada tidak serta merta muncul dari realitas hampa. Dalam kebijakan publik sendiri terdapat beberapa proses perumusan produk kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1995), adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah

3) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Legitimasi Kebijakan Bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi—cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan

dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan Publik

Kondisi lingkungan akan memengaruhi hasil akhir sebuah implementasi kebijakan meskipun tidak secara langsung. Sebuah kebijakan telah diperhitungkan secara rasional, struktur implementasi telah dipersiapkan sebaik mungkin, aktor pelaksana dan pola komunikasi juga telah dipersiapkan secara matang, namun hasil akhir bisa berbeda bergantung pada kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Dr. Sahya Anggara, 2018). Secara umum, faktor-faktor kondisi lingkungan yang dipandang dapat memengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor sistem politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Studi yang dilakukan oleh F. van Waarden (Hill dan Hupe, t.t.: 165-167) membahas tentang hal tersebut secara lebih terperinci.

a) Faktor Politik

Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik aktor dari kalangan pemerintah (presiden, menteri, panglima TNI, dan lain-lain) maupun dari kalangan bukan pemerintah (pengusaha, media massa, LSM, dan lain-lain)

b) Faktor Ekonomi/Finansial

Faktor ini perlu dipertimbangkan apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi di negara/daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat/ memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memerhatikan keuangan daerah sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit. Hal ini memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

c) Faktor Administrasi/Organisatoris

Dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintahan, kadang- kadang banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada, misalnya dengan terbukanya aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran

d) Faktor Teknologi

Faktor teknologi dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi sumber daya manusia yang mempergunakan teknologinya tidak siap. Contoh sederhana perangkat komputer/laptop hanya dipergunakan untuk mengetik.

Apabila dilihat pada program-program yang ada, dalam perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan/penciptaan lainnya bergantung pada kesiapan SDM-nya.

e) Faktor Sosial, Budaya, dan Agama

Kebijakan yang diciptakan tidak menimbulkan benturan sosial, budaya, dan agama. Contohnya yang terjadi di Kota Padang dalam rencana pembangunan Rumah Sakit SLAOM dan kegiatan ekonomi, dikritik oleh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat karena akan berpengaruh tegaknya agama Islam. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor luar untuk membangun daerah, tetapi di sisi lain masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut. Hal ini diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dalam membangun daerahnya.

f) Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah. Misalnya, dalam pembangunan gerbang batas negara/daerah yang dapat menimbulkan konflik antardaerah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya melakukan sosialisasi dengan berbagai

pihak yang berkaitan dan koordinasi antara negara dan negara atau antara daerah yang berbatasan.

2.2.3 Aktor yang Berperan dalam Proses Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan, menurut Charles Jones (dalam Solichin, 2005 : 9) sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni : golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis dan golongan reformis. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana pelaku masing-masing golongan aktor tersebut dalam proses kebijakan.

1) Golongan Rasional

Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelumnya dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat disediakan. Oleh sebab itu gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap alternatif yang mungkin, berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

2) Golongan Teknisi

Golongan teknisi dalam melaksanakan ugasnya boleh jadi memiliki kebebasan, namun ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya, peran yang mereka mainkan dalam hal ini sebagai seorang spesialis atau ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

3) Golongan Inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis identik dengan para politisi, cenderung memiliki sifat kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan teknisi.

4) Golongan Reformis

Golongan aktor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial. Gaya golongan aktor reformis ini pada umumnya sangat radikal, kerap kali disertai dengan tindakan-tindakan demokrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah. (Solichin, 2005 : 35).

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

2.3.1 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi sempat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000: 11).

Sedangkan pandangan lain menurut Winarno (2008: 225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.3.2 Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Ada banyak pengemuka Teori Evaluasi Kebijakan Publik, disini peneliti memaparkan kajian evaluasi dampak kebijakan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Jones (1984:199), yaitu menurutnya bahwa: “Evaluation is an activity designed to judge the merits of government programs which varies significantly in the specification object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation”. Ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu, memiliki metode analisis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Ini dikarenakan melalui proses spesifikasi inilah teridentifikasi tujuan atau kriteria-kriteria yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Tentang hal ini Jones kemudian menjelaskan: “Evaluation refers to the identification of the goals or criteria by which a program or process is to be evaluated” (Debby D. V. Kawengian & Joyce Jacinta Rares, 2015)

Berdasarkan perangkat evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas, maka Jones (1984:4) selanjutnya menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dipergunakan untuk dua kepentingan yaitu :

- 1) Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah tools untuk melihat kembali, kemudian mengantisipasi atau menilai semua kemajuan yang dapat dicapai oleh pemerintah kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan.
- 2) Merupakan upaya yang sistematis, untuk menilai manfaat dari program-program pemerintah tertentu. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi metode-metode yang sistematis untuk menilai program-program pemerintah seperti metode eksperimental, metode perbandingan, replikasi atau analisis biaya manfaat.

2.3.3 Model Evaluasi Kebijakan menurut Jones (1984:4)

Selanjutnya Jones (1991:359) kemudian menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 tipe tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan (Debby D. V. Kawengian & Joyce Jacinta Rares, 2015) yaitu :

- 1) Political Evaluation (evaluasi untuk kepentingan politik). Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan “Apakah program yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara. Apakah program yang akan dilaksanakan akan meningkatkan dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah program yang akan dilakukan akan meningkatkan dukungan dari media.
- 2) Organizational evaluation. Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi organisasi berangkat dari pertanyaan apakah program yang akan dilaksanakan

akan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana yang ada. Apakah manfaat yang akan diterima oleh badan-badan pelaksana, akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Apakah program yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan perluasan terhadap badan-badan pelaksana.

- 3) Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) evaluasi substantif adalah untuk melihat “apakah program mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditetapkan (dalam undang-undang atau dalam bentuk spesifikasi tertentu). Apa bentuk dampak yang dihasilkan oleh program.

Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi model teori yang mengarah pada evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Jones (1984:4) yaitu pada tipe *Substantive Evaluation* karena dianggap tepat untuk membantu peneliti menjawab permasalahan tentang Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat Terhadap Komunitas Pedagang Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri Jawa Timur. Secara umum, penelitian ini hanya mengkaji dampak kebijakan yang dibatasi kepada para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Sementara kepada pihak-pihak lain, sengaja tidak dimasukkan mengingat luasnya dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat ini.

2.4 Evaluasi Substantive atau Evaluasi Dampak

Evaluasi Substantive atau Evaluasi Dampak merupakan evaluasi yang menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan melalui dampak yang terjadi pasca kebijakan dilakukan.

2.4.1 Pengertian Dampak

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

2.4.2 Tujuan Evaluasi Substantive/Dampak

Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan efektivitas sebuah kebijakan/ program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- a) Menilai bahwa program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga;
- b) Menilai bahwa dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program;
- c) Mengeksplorasi adanya akibat yang tidak diperkirakan, baik yang positif maupun yang negatif.

- d) Mengkaji cara program memengaruhi kelompok sasaran, dan perbaikan kondisi kelompok sasaran disebabkan oleh adanya program ataukah karena faktor lain

2.4.3 Dampak Perubahan Sosial dan Ekonomi

Dampak yang diakibatkan oleh PPKM Darurat terhadap pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri cukup banyak. Dua hal yang paling dirasakan dampaknya oleh para pedagang besi adalah dampak ekonomi dan dampak sosialnya. Douglas dkk (dalam Disbudpar Banten, 2013:28) menjelaskan tentang dampak sosial kebijakan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti, (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015 : 21) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Dari hal tersebut penulis dapat menilai dampak yang dialami oleh para pedagang besi di Pasar Setono Betek Koat Kediri dilihat dari indikator yang sudah dijelaskan dalam dua teori tersebut.

2.5 Tentang Pasar Tradisional

Dikutip dari (IKA DEVY PRAMUDIANA, 2017) bahwa Pasar pada masyarakat mempunyai peranan penting yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan produksinya seperti modal, peralatan, dan tenaga. Menurut Koentjaraningrat (2002:3)⁴ pengertian pasar adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan. Berdasarkan teori diatas dapat di simpulkan bahwa, pasar adalah tempat pertemuan antara produsen dan konsumen yang melakukan transaksi barang dan jasa berdasarkan harga yang di tetapkan

Jadi kesimpulannya adalah Pasar tradisional merupakan tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem yang masih konvensional yang menyediakan kebutuhan pokok maupun non pokok untuk masyarakat.

2.5.1 Kriteria Pasar Tradisional

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2012 tentang Peraturan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, menyatakan kriteria dari pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a) Pasar Tradisional dimiliki, dibangun atau dikelola oleh pemerintah daerah

- b) Transaksi dilakukan secara tawar menawar.
- c) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
- d) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

2.6.2 Jenis- jenis Pasar

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yakni menurut jenis kegiatannya, menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, menurut waktu kegiatannya, dan menurut status kepemilikannya.

- a) Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis,yaitu :
 - 1) Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
 - 2) Pasar grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
 - 3) Pasar induk Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan- bahan pangan untuk disalurkan ke grosir- grosir dan pusat pembelian.
- b) Menurut Lokasi dan Kemampuan Pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis yaitu:
 - 1) Pasar regional, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh

wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

- 2) Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000-220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk, dan pasar grosir.
- 3) Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani sekitar 50.000- 60.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran, pasar khusus, dan pasar induk.
- 4) Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000- 15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.
- 5) Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

c) Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:

- 1) Pasar siang hari, yang beroperasi dari pukul 04.00- 16.00
 - 2) Pasar malam hari, yang beroperasi dari pukul 16.00- 04.00
 - 3) Pasar siang malam, yang beroperasi 24 jam nonstop.
 - 4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah dan diadakan pada saat peringatan hari- hari tertentu. Contohnya: Pasar Maulud, Pasar Murah Idulfitri, dan sebagainya.
- d) Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:
- 1) Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 - 2) Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.
 - 3) Pasar Liar yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintah daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar yang tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW. Pasar liar ini dibagi tiga berdasarkan penanggungjawabannya, yakni pasar perorangan, pasar RW dan pasar desa.

2.6 Definisi PPKM Darurat

PPKM merupakan kependekan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digunakan pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 No.15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat diberlakukan selama dua pekan lebih sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup, pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari juga dibatasi jam operasionalnya.

2.6.1 Aturan PPKM Darurat

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan intruksi Menteri Dalam Negeri (INDAGRI) Nomor 18 Tahun 2021. Aturan yang ditanda tangani pada tanggal 8 Juli 2021 yang merumpukan perubahan ke dua atas Indagri Nomoer 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa da Bali. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan peneyebaran virus Covid 19. Berikut adalah aturan PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah :

a) Sektor Essensial :

- 1) Keuangan dan Perbankan: hanya meliputi asuransi, bank, dana pension, dan Lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan. Ketentuannys dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50

persen staf untuk lokasi berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

- 2) Pasar Modal : Untuk yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer dan berjalannya pasar modal secara baik. Ketentuan: dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.
- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketentuan: dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf
- 4) Perhotelan Non Penanganan Karantina ketentuannya dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen staf
- 5) Industri orientasi ekspor: pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor Barang (PEB). Selama dua belas bulan terakhir atau dokumentasi lain yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industry (IOMKI). Ketentuan: dapat beroperasi maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya

b) Sektor Non Esensial

Untuk Sektor Non Esensial diberlakukan 100 % WFH (Work From Home). Sektor ini tidak menghasilkan atau menyediakan bahan makanan, kesehatan (perawatan kesehatan dan farmasi) ataupun dukungan keuangan, seperti bank. Karena

pada intinya sektor ini memang tujuannya lebih mengarah pada rekreasi atau penghilang penat sesaat. Artinya kegiatan usaha yang ada di dalam sektor ini tidak selalu dibutuhkan semua orang atau tidak membawa dampak besar untuk kehidupan masyarakat luas. Contoh sektor non esensial ialah bioskop, karena tidak semua orang membutuhkan bioskop untuk menonton film.

c) Sektor Kritis :

- 1) Kesehatan : Ketentuannya dapat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian . Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.
- 2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : Ketentuannya dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian
- 3) Penanganan Bencana : Ketentuannya dapat beroperasi 100 persen maksimal staf hanya fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf. dll
- 4) Protokol Kesehatan 5 M (Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan/ menggunakan handsanitizer, memakai masker dan menjaga kerumunan dan mengurangi mobilitas.
- 5) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup
- 6) Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away

- 7) Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 8) Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
- 9) Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- 10) Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- 11) Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 12) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi.
- 13) Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

- 14) Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3 Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:
- a) Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate kontak erat per kasus konfirmasi.
 - b) Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - c) Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell dalam buku *Research Design* (2008), mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil

penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.

Bodgan dan Taylor dalam Lexy J. Moloeng 2013:4 (Indra Lesemana Taddi et al., 2020) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Sedangkan menurut Sukmadinata yang dikutip dari bukunya (2009:53-60), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moloeng (2013:6).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan utama penelitian yang sedang dilakukan. Dan untuk membatasi tentang apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga peneliti akan lebih fokus terhadap aspek-aspek yang penting untuk dibahas. Selain itu fokus penelitian juga akan membantu peneliti mendalami aspek-aspek pembahasan. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapat kesimpulan yang lebih mendalam dan terfokus terhadap penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak yang diakibatkan oleh Kebijakan PPKM Darurat terhadap Komunitas Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Penelitian ini mengacu pada teori Jones tipe *Substantive Evaluation* (Evaluasi Dampak). Parameter Substantive Evaluation adalah sejauh mana dampak yang diakibatkan oleh Kebijakan PPKM Darurat terhadap komunitas pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang dapat diukur dari :

a) Dampak Ekonomi

Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Faktor ekonomi termasuk ke dalam dampak yang paling besar ditimbulkan akibat dari kebijakan PPKM darurat ini. Indikator dampak ekonomi dapat dilihat dari :

- 1) Dampak terhadap pendapatan
- 2) Dampak terhadap aktivitas ekonomi
- 3) Dampak terhadap pengeluaran.

b) Dampak Sosial

Terjadinya dampak sosial yang dialami oleh para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

- 1) Perubahan sistem sosial
- 2) Nilai-nilai individu dan kolektif,
- 3) Perilaku hubungan sosial,
- 4) Gaya hidup dan ekspresi mode serta,
- 5) Struktur masyarakat

Selain itu peneliti juga akan mengembangkan informasi yang diperoleh di lapangan yang relevan dengan dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam kegiatan melakukan penelitian karena lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari obyek yang diteliti, disamping itu juga terdapat sumber-sumber informan yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini melakukan penelitian tentang Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat Terhadap Komunitas Pedagang Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Yang letak lokasi Jl. Pattimura, Pasar Setonobetek, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64129.

3.4 Informan

Informan adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang di dapat dari narasumber di peroleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan data dari narasumber atau informan. Dengan informan-informan yang peneliti tentukan untuk diwawancarai dengan cara mewawancarai orang-orang yang menurut peneliti penting agar bisa mendapatkan data yang valid, informan-informan yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu

Tabel 3. 4 Tabel Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pasar Setono Betek Kota Kediri	1 Orang
2.	Petugas Operasional Pasar	1 Orang
3.	Para Pedagang Besi Tua yang terdampak akibat Kebijakan PPKM Darurat	4 Pedagang
JUMLAH		6 Orang

Sumber : Data Diolah Peneliti

3.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti adalah :

- a) Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan di lapangan. Data Primer yang ingin didapatkan oleh peneliti adalah data dari para informan seperti Kepala PD Pasar Setono Betek Kota Kediri, para pedagang besi tua yang terdampak dan berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara mendapatkan data dari buku-buku, bentuk pustaka, website, jurnal dan dokumentasi yang berhubungan dengan dampak evaluasi kebijakan terhadap PPKM Darurat terhadap para Pedagang besi tua di Pasar Setonobetek Kota Kediri.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik tersebut. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

- 2) Observasi atau Studi lapangan merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dilokasi penelitian secara observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.
- 3) Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah observasi dilakukan. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007 : 108). Melalui wawancara peneliti berharap dapat mengetahui permasalahan secara lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit/kecil, wawancara ini berbentuk tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan telepon (Sugiono, 2010 : 138- 140). Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh

melalui observasi kurang mendalam. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan (Sugiyono,2005:72) bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.Untuk penelitian ini,peneliti memerlukan beberapa data seperti aturan PD pasar setono betek dalam melakukan penertiban ketika ppkm darurat dilakukan,fakta yang terjadi di lapangan yang dirasakan oleh pedagang yang terdampak,hasil kebijakan apakah telah sesuai tujuan yang diinginkan dan beberapa data lain.

- 4) Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertentu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan serta kebijakan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek data dan merupakan bahan utama dalam penelitian

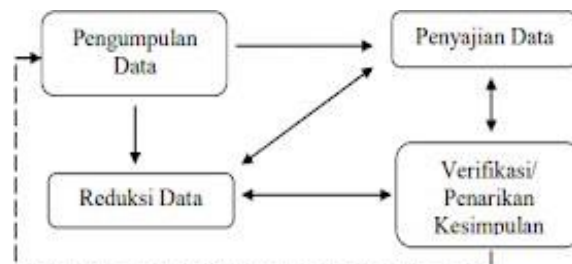
3.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini merupakan penyusunan atau proses untuk mengumpulkan data dengan cara memperoleh data dari wawancara,dokumentasi, studi lapangan, dan studi pustaka. Setelah mendapatkan hasil dari beberapa macam pengumpulan data hasil dari pengumpulan tersebut. Karenan

penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif maka hasil pengumpulan data akan diuraikan atau dijabarkan dengan kata-kata untuk menjadikan sebuah deskripsi dari hasil pengumpulan data tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut :

Gambar 3. 7 Proses Analisis Data Kualitatif



Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pasar Setono Betek Kota Kediri

Pasar Setono Betek adalah salah satu pasar terbesar di Kota Kediri, yang lokasinya berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri Jawa Timur. Pasar ini awalnya adalah pasar tradisional namun seiring perubahan jaman, pasar ini berubah konsep menjadi pasar tradisional semi modern. Merupakan salah satu pasar terbesar di kota Kediri, pasar ini memiliki luas lahan sebesar 36.717 m² dan luas bangunan sebesar 9.625 m². Dan awalnya, lahan yang digunakan untuk pasar ini adalah sebuah lapangan.

Pasar Setono Betek Kota Kediri awalnya mulai beroperasi pada tahun 1956 dan baru dibangun 39 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1982. Awal mula para pedagang hanya berjualan di toko sekitar jalan pattimura, yang kemudian makin lama melebar dan semakin banyak. Akibatnya pedagang yang berjualan di depan toko tersebut sering mengalami penertiban Satpol PP hingga kejar-kejaran dengan petugas. Karena mengakibatkan lokasi di sekitar jalan pattimura macet dan bahkan tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan, karena sudah beralih fungsi menjadi pasar. Maka dari itu, pada tahun 1982, dibangunlah lokasi pasar yang awalnya sebuah lapangan yang kosong.

Pada tahun 2018 Pasar Setono Betek direnovasi dan berubah konsep menjadi pasar tradisional semi modern. Diharapkan dengan perubahan bangunan dan konsep, pasar ini mampu bersaing dengan pasar modern di Kota Kediri seperti Kediri Mall dan Kediri Town Square. Karena ribuan pedagang menggantungkan nasibnya di pasar ini, mulai dari barang kebutuhan pokok, pasar hewan, pasar besi ada di pasar ini. Dan pasar ini juga satu-satunya pasar di Kota Kediri yang beroperasi setiap hari selama 24 jam.

A. Letak Geografis Pasar Setono Betek Kota Kediri

Pasar Setono Betek Kota Kediri jika dilihat secara geografis terletak di Kelurahan Setono Pande Kota Kediri dengan letak koordinat LS 07°49.311'BT 112°00.983'. Lokasi ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jagalan, Kota Kediri
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Dalem, Kota Kediri.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ringin Anom, Kota Kediri
- d) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singonergaran, Kota Kediri.

Berada di lokasi strategis di tengah kota, akses untuk menuju pasar ini sangat mudah. Kita bisa menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Bahkan di lokasi sekitar pasar banyak terdapat becak yang merupakan transportasi tradisional.

B. Kegiatan Operasional di Pasar Setono Betek Kota Kediri

Kegiatan Operasional utama di Pasar Setono Betek Kota Kediri sudah pasti kegiatan jual beli yang melibatkan para pedagang dan pembeli. Pasar Setono Betek Kota Kediri merupakan pasar yang menyediakan barang yang tergolong lengkap yang tidak ada di pasar lain maupun di pasar modern seperti swalayan dan mall. Untuk jam operasional Pasar Setono Betek Kota Kediri adalah 24 jam. Terdapat 6 Blok area pasar, terdapat perbedaan jam operasional di setiap blok nya. Berikut jam Operasional di setiap blok di Pasar Setono Betek Kota Kediri :

Tabel 4.1 Jam Operasional Pasar Setono Betek Kota Kediri

No.	Nama	Jam Operasional Pasar
1.	Blok A (Pakaian dan Sayuran)	24 jam
2.	Blok B (Gerabah dan Buah)	24 jam
3.	Blok C (Daging dan Ikan)	24 jam
4.	Blok D (Sembako)	24 jam
5.	Blok E (Besi dan Onderdil Keendaraan)	Pukul 07.00 – 15.00
6.	Blok F (Pasar Burung)	Pukul 07.00 – 15.00

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel yang tertera diatas, terdapat perbedaan jam operasional pada blok E dan F yang merupakan area pasar besi dan pasar burung. Kedua blok bagian itu menjual barang Non Esensial (bukan kebutuhan pokok) sehingga untuk jam operasionalnya juga tidak 24 jam seperti blok lain. Terlebih pada bagian pasar burung, tidak mungkin beroperasi selama 24 jam karena yang dijual adalah makhluk hidup yang memerlukan istirahat dan perlakuan khusus agar para burung yang dijual tidak mati.

Secara keseluruhan Pasar Setono Betek Kota Kediri buka 24 jam dan gerbang pintu masuk ke dalam pasar juga tidak pernah ditutup dan selalu ada petugas yang berjaga. Dan untuk blok E dan F yang tidak beroperasi 24 jam, biasanya petugas hanya mematikan lampu di sekitar area blok itu, karena memang tidak ada penjual yang berdagang. Namun untuk keamanannya juga selalu diawasi oleh petugas yang selalu berkeliling di area pasar.

C. Keadaan di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

Pedagang yang berjualan di pasar Setono Betek Kota Kediri melakukan kegiatan jual beli dengan tenang dan damai. Pedagang pasar Setono Betek ini tidak hanya berasal dari warga Kota Kediri saja. Namun, juga ada dari warga Kabupaten Kediri. Bahkan ada pedagang yang berasal dari berbagai daerah di luar Kota Kediri, beberapa pedagang yang berasal dari daerah lain seperti: Tulungagung dan Nganjuk.

Keadaan Pasar Setono Betek secara luas wilayah sangat lah besar. Bahkan untuk area Blok A yang notabene gedung baru, masih banyak terdapat kios yang kosong. Banyaknya pedagang yang memilih berjualan di wilayah gedung lama dibanding gedung baru menjadi penyebabnya. Meskipun di klaim menjadi pasar semi modern, keadaan pasar Setono Betek ini masih jauh dari standart yang harusnya dicapai oleh pasar semi modern seperti yang ada di Pasar Serpong, Tangerang, Indonesia. Masih banyak yang harus dibenahi baik dari segi bangunannya dan tata kelola yang ada.

Jam operasional pasar yang 24 jam, membuat Pasar Setono Betek Kota Kediri ini berbeda dengan pasar lain yang ada di Kota Kediri yang mayoritas buka mulai pukul 06.00 pagi. Pasar Setono Betek bahkan mulai padat di datangi pembeli pada jam 00.00 WIB. Mayoritas para pembeli di jam ini adalah para pedagang keliling yang sedang berbelanja kebutuhan dagangannya untuk dijual kembali. Dan biasanya ketika jam sudah mulai pukul 05.00 WIB pagi, para pembeli yang merupakan para pedagang keliling tersebut sudah berbondong-bondong meninggalkan area pasar yang selanjutnya menuju ke tempat jualan mereka yang biasanya berjualan di rumahnya ataupun keliling menggunakan motornya. Dan untuk wilayah pasar besi tua, mulai di padati pembeli ketika pukul 09.00 pagi. Biasanya para konsumen yang ada di bagian pasar besi adalah mereka yang berprofesi sebagai montir, tukang kunci, pemilik bengkel mobil atau motor dan para pekerja bangunan. Berbeda dengan area yang menjual kebutuhan Esensial (kebutuhan pokok) yang ketika menjelang semakin siang mulai sepi, tapi untuk area kebutuhan Non Esensial ketika semakin siang pembelinya akan semakin ramai.

Memang jika dilihat dari jumlah keseluruhan pedagang yang berjumlah ribuan, untuk blok pasar besi tua ini memanglah memiliki jumlah pedagang yang paling sedikit jika dibandingkan pedagang sayur dan kebutuhan pokok. Pedagang di blok pasar besi hanya berjumlah sekitar 60 pedagang, sedangkan pedagang sayur dan kebutuhan pokok berjumlah lebih dari 1.000 pedagang. Tapi meskipun begitu, pasar besi tua yang terdapat di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini selalu dipadati para

pembeli,karena hanya disinilah satu-satunya tempat yang menyediakan kebutuhan bangunan, besi dan onderdil secara lengkap di Kota Kediri.

Jika dilihat dari keadaan bangunannya sekarang, Pasar Setono Betek ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya . Renovasi pasar yang terakhir dilakukan pada tahun 2017, membuat keadaan pasar ini cukup berubah dari segi bangunan, tata kelola dan jumlah konsumen yang ada. Dilihat dari segi bangunan sekarang, pasar ini jauh lebih modern meskipun belum seluruhnya direnovasi. Tapi dalam segi tata letaknya, masih belum. Terbukti dengan banyaknya kios yang kosong di bagian gedung baru, dan para pedagangnya malah lebih memilih tetap di lokasi yang lama. Dan hanya bagian blok pasar besi saja yang dari dulu tidak berubah, karena pengelola sendiri hanya merenovasi bagian jalan yang ada di bagian blok besi, untuk gedung dan kiosnya sampai saat ini belum pernah mengalami renovasi seperti blok pasar setono betek yang lainnya

4.2 Hasil Temuan Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan cara mewawancarai secara langsung para responden yang berhasil ditemui. Wawancara dilakukan dengan para pedagang besi , pengelola pasar dan para konsumen yang berada di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Hal ini bertujuan agar informasi yang di dapat lebih akurat. Informan dalam penelitian ini di wawancarai pada tanggal 1 – 14 Desember 2021 di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Wawancara dilakukan responden sebanyak 5 orang dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.

Karakteristik Informan yang terlibat dalam penelitian ini berdasarkan umur, jenis kelamin Umur, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan. Data mengenai informan diambil berdasarkan pernyataan langsung dari informan tersebut. Adapun data mengenai karakteristik informan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Umur , Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Shaenudin	Laki-laki	43 Tahun	Kepala Koordinator Pasar Setono Betek Kota Kediri
2.	Subagyo	Laki-laki	41 Tahun	Petugas Retribusi Blok Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri
3.	Solikin	Laki-laki	33 Tahun	Pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri
4.	Sonni	Laki-laki	50 Tahun	Pedagang Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri
5.	Paijo	Laki-laki	55 Tahun	Pedagang Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri
6.	Supriyono	Laki-Laki	50 Tahun	Pedagang Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, kelima informan tersebut sudah mewakili aspek yang dibutuhkan untuk data penelitian. Pengambilan informan tidak bisa diambil secara bebas, namun harus berkaitan dengan penelitian yang ada dan relevan dengan data yang ingin diambil dari informan tersebut.

4.2 Aktivitas Kegiatan di Pasar Setono Betek selama PPKM Darurat

Aktivitas kegiatan masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat sangat dibatasi, terutama aktivitas yang menimbulkan kerumunan warga. Tidak terkecuali di

pasar yang biasa dengan aktivitasnya sering menimbulkan kerumunan. Di Pasar Setono Betek Kota Kediri pemberlakuan PPKM Darurat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti yang tertera di Surat Edaran 442.2/8/419.033/2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Corona Disease 19 bahwa pusat perbelanjaan dan perdagangan yang tergolong di sektor Esensial diberlakukan 50% *Work From Office (WFO)* dan sektor Non Esensial diberlakukan 100% *Work From Home (WFH)*. Dengan adanya aturan tersebut, pihak pengelola Pasar Setono Betek Kota Kediri mengatur pelaksanaan aturan PPKM Darurat sesuai dengan perintahnya. Di Pasar Setono Betek Kota Kediri terdapat dua kelompok golongan pedagang, yaitu pedagang di sektor Esensial dan Non Esensial. Untuk pedagang di sektor Esensial diberlakukan sistem pembatasan jam operasionalnya yaitu sampai pukul 20.00 WIB dan untuk sektor Non Esensial diberlakukan *WFH (Work From Home)* selama dua minggu.

Berbeda dengan kondisi pada saat normal, selama adanya PPKM Darurat aktivitas di dalam pasar mengalami penurunan. Terlebih untuk bagian Non Esensial yang terdapat di Blok E dan F yang merupakan bagian pasar besi tua dan pasar burung ditutup total selama dua minggu. Tidak ada akses masuk ke dalam bagian blok pasar besi dan pasar burung, semua pedagang tutup total. Akibatnya para pedagang di blok besi ini harus menutup sementara kios mereka. Sedangkan untuk bagian sektor Esensial yang ada di blok A sampai blok D masih tetap dibuka namun dibatasi jam operasionalnya. Tidak hanya itu, penerapan protokol Kesehatan juga dilakukan di pasar Setono Betek ini seperti memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak terus

dilakukan. Bahkan para petugas pengelola pasar sering berkeliling dan mengingatkan para pedagang yang masih bandel tidak menggunakan masker.

Untuk wilayah blok Pasar Besi dilakukan penutupan wilayah total selama dua minggu. Pedagang besi tidak diperbolehkan untuk berjualan di dalam kios mereka dan dianjurkan bekerja dari rumah. Pihak pengelola pasar menghimbau para pedagang besi untuk menaati aturan kebijakan yang ada. Kegiatan penutupan di area blok pasar besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini mulai dilakukan pada tanggal 03 Juli sampai 20 Juli 2021. Para pedagang besi dianjurkan untuk bekerja melalui rumah mereka dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Mereka dianjurkan untuk bekerja secara online yang dalam hal ini menggunakan media telfon genggam untuk berdagang. Para pedagang ini dianjurkan untuk memberikan nomer telepon mereka ke pelanggan mereka, yang diharapkan jika para pembeli tersebut ingin membeli besi bisa telepon terlebih dahulu atau memesannya melalui telepon. Dan dibawah ini adalah gambaran keadaan Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri pada saat diterapkanny PPKM Darurat.



Keterangan Gambar : Akses pintu masuk menuju pasar besi ditutup oleh pihak pengelola Pasar Setono Betek Kota Kediri.



Keterangan Gambar : Area dalam blok pasar besi yang sepi dan tidak ada aktivitas jual beli seperti biasanya .

Gambar 4.3 : Kondisi Pasar Besi saat penerapan PPKM Darurat berlangsung

(Sumber : Dokumentasi Penulis)

Terlihat seperti gambar diatas adalah potret ketika pelaksanaan PPKM Darurat dilakukan. Terlihat jelas bahwa area blok pasar besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri akses pintu masuknya ditutup total. Dan di dalam pasarnya pun kios-kios para pedagang besi ini tutup semua dan tampak sepi tidak adanya aktivitas jual beli seperti biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola Pasar Setono Betek Kota Kediri benar-benar mematuhi aturan pemerintah dan melaksanakannya. Dan begitu juga para pedagang besi yang kooperatif melaksanakan peraturan yang diberikan.

4.4 Evaluasi Dampak Kebijakan PPKM Darurat Terhadap Komunitas

Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri

Adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan tegas untuk menekan angka penyebaran Virus Covid-19. Selain meresahkan, Virus Covid-19 ini juga berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Aktivitas masyarakat dibatasi melalui beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga saat ini PPKM Darurat. Sudah pasti bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak bagi masyarakat. Entah berdampak positif maupun negatif. Seluruh elemen masyarakat merasakan dampak akibat munculnya kebijakan-kebijakan ini. Tidak terkecuali para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Mereka harus rela menutup kiosnya selama dua minggu lamanya karena adanya peraturan PPKM Darurat ini. Hal ini sangat berdampak bagi mereka. Dampak yang paling besar dirasakan oleh para

pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini adalah dari segi sosial dan ekonomi. Pada penelitian ini, fokus utama yang ingin dibahas adalah dampak kebijakan PPKM Darurat terhadap komunitas pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri dan bukan yang lain. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dampak dalam faktor ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini. Karena faktor ekonomi dan social ini merupakan dua hal yang paling besar dampaknya.

a) Dampak Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan dampak yang paling dirasakan oleh para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Karena adanya aturan bahwa pedagang Non-Esensial diberlakukan 100% WFH (Work From Home) yang membuat para pedagang besi ini harus mengikuti aturan yang ada. Para pedagang ini tidak diperbolehkan berjualan di dalam kios mereka selama dua minggu. Hal ini secara otomatis mempengaruhi income (pendapatan) mereka. Terlebih mereka tergolong pekerja harian, yang artinya pendapatan yang mereka peroleh tergantung dari apa yang mereka dapatkan hari itu juga.

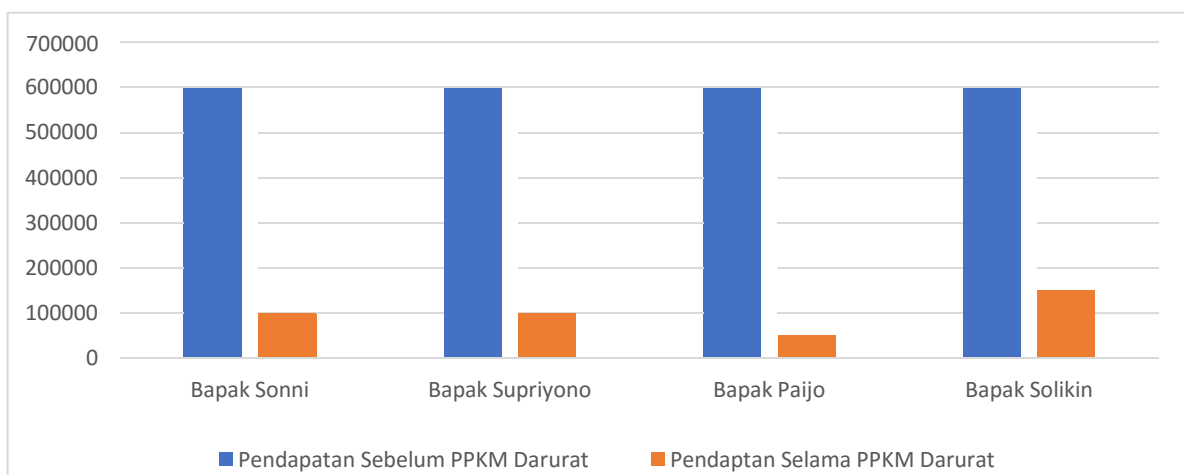
Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian aktivitas ekonomi tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih

dahulu. Seperti halnya pedagang besi yang merupakan pedagang sekunder yang secara otomatis ketika pandemi terjadi penurunan pendapatan dialami oleh mereka, ditambah kebijakan PPKM Darurat yang membuat Pasar Besi di tutup selama dua minggu. Untuk mengukur indikator dampak ekonomi yang dialami oleh para pedagang besi yaitu a) dampak terhadap pendapatan, b) dampak terhadap aktivitas ekonomi, c) dampak terhadap pengeluaran.

1) Dampak terhadap pendapatan

Tidak adanya akses berjualan di dalam kios mereka, secara otomatis membuat para pedagang besi ini mengalami perubahan pendapatan (*income*). Dan berikut ini tabel pendapatan yang diperoleh para pedagang besi ini selama penutupan pasar besi.

Gambar 4.4 Diagram Pendapatan Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri Sebelum dan Selama PPKM Darurat



Gambar 4.4 : Menunjukkan pendapatan para pedagang besi sebelum adanya PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat berlangsung

Sumber : Data Diolah Penulis

Dari tabel diatas,terlihat jelas bahwa income (pendapatan) para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini turun drastis.Jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKM Darurat ini.rata-rata penghasilan harian mereka sebesar Rp 600.000 namun ketika adanya aturan PPKM Darurat ini dilaksanakan,penghasilan yang mereka peroleh rata-rata hanya Rp 100.000 dan bahkan bisa tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan key informan terkait dampak PPKM Darurat terhadap para pedagang besi yang disampaikan oleh Kepala Koordinator Pasar Setono Betek Kota Kediri Bapak Saenuddin,berikut ini adalah jawaban terkait dampak PPKM Darurat terhadap komunitas Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri :

“...yang paling jelas terlihat dampaknya itu dari segi ekonomi mbak,karena ya mereka ini (para pedagang besi) tidak bisa berjualan di kios mereka. Hampir 90% penghasilan mereka turun drastis.Dari sebelum pandemi ada,pasar besi disini termasuk yang paling ramai dan lengkap di Kota Kediri. Namun semenjak adanya pandemic dan ditambah ada kebijakan PPKM Darurat ini para pedagang besi ini justru yang paling terdampak dari segi penghasilan harian yang di dapatkan,jika dibandingkan pedagang kebutuhan pokok yang ada di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini ..” (Wawancara , tanggal 02 Desember 2021)

Selanjutnya disampaikan pula oleh Bapak Subagyo selaku Petugas Retribusi Blok Pasar Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“...Ya karena tidak diperbolehkan berjualan,sudah pasti mereka tidak dapat penghasilan seperti biasanya ya Mbak. Bahkan ketika saya menyampaikan bahwa akan adanya penutupan di daerah blok besi,mereka langsung kaget dan bingung.Karena ya mayoritas pedagang besi disini itu tulang punggung keluarga dan yang namanya pedagang itu kan penghasilannya harian kan mbak,jadi ya kalo mereka gak jualan ya mereka bisa dapat uang dari mana..” (Wawancara,02 Desember 2021)

Pernyataan selanjutnya dari Bapak Sonni, selaku salah satu pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“...Selama ditutup ini ya pendapatan saya turun mbak, malah belum tentu saya dapat uang per harinya. Saya dapat uang selama ini ditutup ya gak lebih dari Rp 150.000 mbak. Itupun karena langganan saya kadang telfon saya, tanya ada barang ini nggak pak, kalo kebetulan saya ada barangnya ya saya ambilkan ke kios dulu sebentar. Janjian sama langganan saya itu, setelah ambil barang di kios ya saya balik lagi. Kalo gak ada yang telfon beli barang ya saya gak dapat uang sama sekali...” (Wawancara, tanggal 15 Desember 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Kebijakan PPKM Darurat sangat berdampak dalam faktor ekonomi terhadap para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini. Aturan pemberlakuan 100% WFH (Work From Home) yang dianjurkan oleh pemerintah, sepertinya kurang bisa diterapkan oleh para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri dikarenakan sistem berjualan mereka yang masih konvensional.

Pendapatan yang diperoleh secara otomatis juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa seluruh pedagang besi mengalami penurunan penghasilan yang secara otomatis mereka juga harus mengatur strategi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap harinya. Hampir semua pedagang besi di Pasar Setono Betek ini adalah laki-laki dan tulang punggung keluarga mereka. Beberapa diantaranya masih bisa mengandalkan penghasilan istrinya ketika para pedagang besi ini tidak dapat berjualan. Tapi juga ada beberapa dari mereka yang menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya yang bekerja mencari uang.

2) Dampak terhadap aktivitas ekonomi

Kebijakan PPKM Darurat yang menyebabkan ditutupnya blok pasar besi membuat aktivitas ekonomi para pedagang besi ini juga terdampak. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan salah satu informan yaitu Bapak Sonni.

“.....Kalo aktivitas ekonomi ya berubahnya dalam segi transaksi jual beli aja ya mbak. Pedagang disini kan biasanya jualannya di kios, tawar menawar sama pembeli juga langsung terus sekarang jadi lewat handphone aja, lewat whatsapp. Yang biasanya pembeli itu bisa milih barang di toko, sekarang jadi cuman pesan aja lewat whatsapp terus saya ambil barangnya di toko. Kan kita juga gak mungkin berdiam diri saja selama dua minggu, kita juga putar otak gimana caranya biar tetap ada penghasilan sedikit-sedikit...” (Wawancara, tanggal 15 Desember 2021)

Seperti yang sudah dijelaskan pada wawancara yang dengan informan, yakni para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri bahwa kebijakan aturan PPKM Darurat ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi mereka. Salah satu aturannya bahwa pedagang Non-Esensial hanya boleh bekerja lewat WFH (Work From Home) 100% yang artinya para pedagang besi ini tidak diperbolehkan berjualan di dalam kios mereka selama kurang lebih dua minggu lamanya. Terjadinya penutupan blok pasar besi secara otomatis mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka. Sedangkan yang kita tahu bahwa para pedagang besi ini setiap harinya berjualan di kios mereka, alat dan dagangan mereka juga berada di dalam kios. Sangat tidak mungkin untuk memindahkan dagangan mereka yang berupa besi dan alat bangunan berat lainnya untuk dibawa ke rumah mereka. Sedangkan mereka pun juga tidak mungkin hanya berdiam diri selama dua minggu tanpa berusaha untuk mencari penghasilan

harian.Keadaan inilah yang membuat mereka akhirnya berjualan dengan memanfaatkan sosial media mereka yaitu melalui whatsapp untuk mempromosikan jualannya.Sebagian pedagang ini memutar otak mencari strategi berjualan melalui whatsapp dengan membagikan nomor whatsapp mereka ke pelanggan mereka.Diharapkan para pelanggan ini bisa menghubungi para pedagang besi jika ingin membeli dagangan mereka.Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa dalam situasi yang terdesak tersebut bisa mendorong perubahan aktivitas ekonomi yang semula secara konvensional menjadi berkembang dengan memanfaatkan media sosial yang ada.

3) Dampak terhadap pengeluaran

Dampak ekonomi identik dengan pendapatan dan pengeluaran.Terdampaknya hasil pendapatan yang diperoleh pada saat ditutupnya blok pasar besi,dari segi pengeluaran juga berpengaruh.Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan salah satu informan yaitu Bapak Paijo sebagai berikut :

“...Secara otomatis pengeluaran harian ya dibatasi mbak,karena kan kita gak bisa kerja kayak biasanya.Kalo saya cuma keluarin uang untuk makan aja,untuk kebutuhan lainnya kayak cicilan harian itu saya pending dulu sampai saya bisa kerja normal lagi.Soalnya pendapatan juga gak menentu,apalagi jualan lewat hp itu ya terbatas,biasanya pembeli bisa milih-milih barang di kios jadi gak bisa.Pendapatan yang diperoleh kan secara otomatis turn drastic mbak kalo seperti ini,hampir 90% pendapatan saya turun.Ya semuanya terdampaklah mbak kalo segi ekonominya...” (Wawancara,tanggal 15 Desember 2021)

Tidak hanya berdampak pada pendapatan,PPKM Darurat ini juga berdampak terhadap pengeluaran harian para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota

Kediri. Pendapatan harian mereka yang tidak menentu, membuat para pedagang ini harus mebatasi pengeluaran harian mereka. Menurut salah satu informan mengatakan bahwa mereka harus menunda beberapa cicilan harian mereka karena tidak adanya pendapatan yang pasti selama penutupan kios pasar besi. Mereka membatasi pengeluaran harian mereka hanya untuk kebutuhan makan setiap harinya dan untuk kebutuhan lain mereka bisa membayarkannya setelah aktivitas ekonomi mereka normal kembali. Beberapa pengeluaran kebutuhan sekunder mereka pending terlebih dahulu, untuk pengeluaran tiap harinya mereka lebih memilih mengutamakan kebutuhan primer mereka.

b) Dampak Sosial

Kebijakan PPKM membawa dampak yang sangat besar dalam aspek sosial masyarakat Indonesia. Selain berdampak pada faktor ekonomi, dari segi faktor sosial juga dirasakan oleh para Pedagang Besi Tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Kecenderungan dari segi sosial ini terlihat dari beberapa indikator yaitu (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat.

1) Perubahan Sistem Sosial

Perubahan Sistem Sosial masyarakat semenjak terjadinya pandemic Covid-19 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terjadinya pandemic Covid-19 membuat semua kegiatan dan interaksi sosial masyarakat dibatasi. Seluruh kegiatan yang menyebabkan kerumunan ditiadakan, interaksi antar masyarakat diutamakan melalui media lain dan tidak secara langsung. Hal ini juga berpengaruh dalam

perubahan sistem sosial yang dialami oleh pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Tertulis dengan jelas dalam aturan pelaksanaan PPKM Darurat bahwa pedagang Non-Esensial 100% bekerja secara WFH (Work From Home). Dan aturan Perubahan Sistem Sosial inilah yang menyebabkan penutupan kios blok pasar besi ditutup total selama dua minggu lamanya. Sistem interaksi sosial antara pedagang dan pembeli di Pasar Setono Betek Kota Kediri yang biasanya dilakukan secara langsung, melakukan kegiatan jual beli secara langsung, tidak bisa dilakukan.

2) Nilai- Nilai Individu dan Kolektif

Nilai nilai individu dan Kolektif yang dimaksud disini adalah sejauh mana masyarakat sadar akan tujuan dibentuknya suatu kebijakan. Dalam hal ini, bisa dilihat dari kesadaran pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini menaati dan melaksanakan aturan yang ada. Para pedagang besi ini sadar akan situasi dan kondisi memang sedang pandemic yang mengharuskan mengedepankan kepentingan Kesehatan terlebih dahulu dari pada kepentingan yang lain. Terbukti selama dua minggu penutupan area blok pasar besi di Kota Kediri para pedagang besi ini taat aturan dan benar-benar menutup kios mereka secara total. Kesadaran para pedagang besi untuk lebih mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat sangat bisa di apresiasi dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keterangan salah satu informan yaitu Bapak Solikin, salah satu pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“...Kemarin waktu tau kalo memang ada penutupan di blok pasa besi, kami langsung konfirmasi ke pihak pengelola pasar setono betek mbak dan ternyata memang benar ada aturannya dan ditunjukkan surat perintahnya dari pak

walikota. Ya kami para pedagang ya dengan kesadaran penuh ya harus menaati aturan. Kita para pedagang juga tidak menutup mata melihat situasi dan kondisinya saat ini memang Kesehatan harus diutamakan dari yang lain. Jadi kita juga tidak ada protes dan menaati aturan yang ada ajalah mbak...” (Wawancara, tanggal 15 Desember 2021)

3) Perilaku Hubungan Sosial

Dampak perilaku hubungan sosial yang dirasakan oleh para pedagang cukup kompleks. Dari hasil wawancara penulis, terdampak perbedaan yang dialami oleh para pedagang besi, berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa key informan. Bapak Paijo, salah satu pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri mengatakan bahwa

“...Kalo saya sejujurnya agak sedikit minder ya mbak. Saya kan ini sudah tua, punya hp pun tidak. Semisal ngelihat ada beberapa rekan pedagang yang bisa jualan lewat hp saat disuruh tutup kemarin saya minder. Tapi ya saya cuman bisa lihat aja,” (Wawancara, tanggal 15 Desember 2021)

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Bapak Saenuddin, Kepala Koordinator Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“...Susahnya itu ketika ada berapa pedagang besi yang sudah tua dan gaptek, itu susah sekali karena mereka gak bisa berjualan lewat handphone atau jarak jauh. Kan rata-rata para pedagang besi disini status sosialnya menengah kebawah dan mereka pun minim gadget. Beberapa pedagang sering mengeluh minder karena tidak dapat memanfaatkan teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan jaman sekarang..” (Wawancara, tanggal 15 Desember 2021)

Selanjutnya, pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Sonni, pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“..Justru sebenarnya lebih mudah jualannya lewat handphone,tapi kan sayaa ini pedagang besi yang kadang juga pelanggan saya minta di pasangin sekalian.Misalnya aada yang beli Onderdil motor bekas,itu biasanya orangnya minta sekalian dipasangin juga mbak.Dan misal terjadi seperti itu kan juga gak bisa kita layaninnya secara online.Tapi dengan adanya PPKM Darurat kemarin saya jadi paham ternyata manfaatin teknologi buat jualan enak juga ternyata.Itu mendorong saya buat belajar lagi biar bisa lebih paham caranya jualan lewat online,saya minta tutor ke anak saya biar saya bisa ..” (Wawancara, 15 Desember 2021)

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bayu ,karyawan di pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

“..dampaknya ya selain gak dapat penghasilan,saya juga stress dan bosan dirumah mbak.Saya kan karyawan disini ini, kalo tokonya ditutup ya saya gak dapat uang.Ya gimana setiap harinya terbiasa bekerja,jadi gak bisa kerja selama dua minggu dan dirumah.Bawaannya juga dirumah jenuh dan emosi mbak.Ya untuk mengusir kejenuhan saya ngamen,uangnya buat makan sehari-hari dan buat ngopi.Ya selama dua minggu say aitu kerjanya serabutan,kadang jadi kuli angkut,kadang juga ngamen di jalanan ” (Wawancara,tanggal 15 Desember 2021)

Dampak periaku sosial yang terjadi di masyarakat,khususnya para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri membuat masyarakat mengalami perubahan hubungan sosial.Hubungan sosial yang dimaksud disini adalah bagaimana cara para pedagang besi ini melakukan interaksi sosial dengan para pembelinya ditengah pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang menyebabkan mereka harus menutup kios mereka selama dua minggu.Sistem sosial mereka secara otomatis berubah dan terbatas.Para pedagang besi ini biasa melakukan interaksi dengan pembelinya secara langsung di kios mereka menjadi harus berinteraksi melalui media lain seperti whatsapp ataupun sosial media pribadi mereka.Hal ini membuktikan bahwa terjadi

dampak sosial yang dirasakan oleh para pedagang besi ini. Berinteraksi dengan pembeli hanya melalui handphone juga rawan terjadinya *miscommunication* (kesalahpahaman) terhadap kegiatan jual beli. Kebijakan PPKM Darurat ini secara tidak langsung juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan berpotensi menimbulkan stress.

4) Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan salah satu indikator dampak sosial. Dampak perubahan gaya hidup juga dialami para pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Terjadinya perubahan gaya hidup dapat terlihat ketika para pedagang besi di pasar Setono Betek Kota Kediri ini membatasi pengeluaran kebutuhan hidup mereka. Tidak adanya pendapatan yang pasti selama penutupan pasar besi, membuat mereka juga harus membatasi pengeluaran mereka. Para pedagang besi ini mengutamakan kebutuhan primer mereka yaitu untuk makan sehari-hari. Mereka menunda pengeluaran kebutuhan sekunder sampai mereka bisa berjualan di Pasar Setono Betek Kota Kediri secara normal lagi dan pendapatan mereka bisa normal kembali. Perubahan ini jelas mendeskripsikan bagaimana gaya hidup para pedagang besi ini terbatas akibat adanya kebijakan PPKM Darurat ini.

5) Struktur Masyarakat

Struktur sosial dapat dikatakan sebagai pola hubungan sosial antar manusia atau kelompok dalam suatu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Pola inilah yang biasanya disebut dengan struktur masyarakat. Pola struktur masyarakat yang terjadi di pedagang besi di pasar Setono Betek terbentuk dari kelompok profesi, dimana terdapat kurang lebih 60 pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Para Pedagang besi ini tidak mengalami perubahan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial mereka tetap terbentuk dari kelompok profesi yang sama. Hubungan antar sesama pedagang juga tidak berdampak signifikan bagi para pedagang. Hanya terjadi perubahan dalam sistem interaksi sosialnya saja.

Dari hasil wawancara diatas, Berbeda dengan dampak dari faktor ekonomi yang bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan mengalami hal yang sama yaitu penurunan pendapatan, dampak dari factor social ternyata lebih kompleks. Adanya perubahan perilaku yang berbeda beda dari setiap key informan menjadi penyebabnya. Telah disebutkan bahwa ada pedagang yang minder dengan dengan perubahan yang ada, namun ada juga pedagang yang malah semakin bersemangat untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan mempelajarinya.

Adanya ketegasan sikap tentang respon penerimaan kebijakan juga berdampak. Terlihat jelas bahwa adanya sikap tegas dari seluruh pedagang besi untuk menerima penutupan blok pasar besi sesuai intruksi pemerintah tidak lebih dari dua minggu. Para pedagang ini dengan senang hati menaati aturan yang ada, namun

penutupan tidak boleh lebih dari dua minggu ataupun diperpanjang setelahnya. Para pedagang besi ini keberatan bila aturan penutupan kios diperpanjang karena mereka juga harus tetap bekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap harinya. Adanya sikap protes apabila ada perpanjangan penutupan blok pasar besi merupakan bentuk perubahan perilaku social yang akan dilakukan para pedagang. Hal ini terlihat jelas ketika dari awal sikap para pedagang yang kooperatif menerima kebijakan yang ada, namun berubah menjadi tegas dan protes apabila kebijakan penutupan diperpanjang. Karena pada dasarnya jika penutupan ini diperpanjang, ini akan memberatkan para pedagang. Meskipun pemerintah menganjurkan untuk 100% WFH (Work From Home) namun tetap saja, pada dasarnya Pasar Setono Betek ini adalah pasar tradisional yang sistem berdagangnya masih konvensional. Selain itu Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan hanya bekerja dari rumah saja. Persoalan ini juga bisa sangat memicu penambahan jumlah penduduk miskin secara signifikan juga dapat meningkatkan jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri milik Rizky Nur yang berfokus pada kebijakan Social Distancing yang diterapkan pemerintah Indonesia

pada awal terjadinya Covid-19 di Indonesia sebelum adanya kebijakan PSBB dan PPKM Darurat. Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa secara Sosial Ekonomi kebijakan Social Distancing memang berdampak pada para pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri, namun jika dibandingkan dengan dampak yang dialami oleh Pedagang Besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri lebih besar. Karena dilihat dari aturan yang diterapkan, pelaksanaannya jelas lebih ketat pada saat PPKM Darurat. Dan yang pasti, penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas tentang dampak Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang notabene adalah kebijakan yang diterbitkan sebelum adanya Kebijakan PPKM Darurat.

4.5 Upaya pemenuhan kebutuhan dasar para Pedagang Besi di Pasar Setono betek Kota Kediri ditengah penutupan Pasar Besi

Harus diakui bahwa dampak pandemi covid-19 apalagi dengan pemberlakuan kebijakan PPKM di Indonesia telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan.

Hal ini juga berlaku pada para pedagang besi yang terdampak dikarenakan harus menutup kiosnya selama dua minggu lamanya. Mereka harus memutar otak mereka agar tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar harian mereka. Berbagai aktivitas dilakukan oleh para pedagang besi, mulai dari beralih profesi dan ada juga yang mengandalkan tabungan mereka untuk kehidupan sehari-hari selama dua minggu lamanya. Bahkan salah satu key informan, Bapak Sonni selaku pedagang besi merupakan seorang ayah yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Memiliki dua orang anak yang sedang kuliah, beliau terpaksa harus menunggak pembayaran uang kuliah anaknya karena tidak adanya penghasilan yang didapat. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya selama PPKM Darurat dilakukan, beliau hanya mengandalkan uang tabungan yang terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya selama PPKM Darurat dilaksanakan. Namun Bapak Sonni juga tidak berdiam diri, beliau masih berusaha mencari nafkah dengan memanfaatkan handphone melalui aplikasi whatsapp. Beliau menyebar nomer telepon ke pelanggannya, tujuannya agar beliau bisa melayani para pelanggannya meskipun hanya via telepon dan mendapatkan uang meskipun tidak seberapa daripada tidak sama sekali.

Hal ini berbeda sekali dengan salah satu key informan penulis yaitu Mas Bayu (27) yang merupakan salah satu karyawan kios besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Akibat dari penutupan pasar besi, ia harus beralih profesi sebagai kuli angkut di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Selama dua minggu. Mas Bayu ini menjadi kuli angkut untuk memenuhi kebutuhan dasar beliau. Berdasarkan pernyataannya setiap hari ia

menjadi kuli angkut untuk dapat mendapatkan uang yang akan digunakan untuk makan, ngopi dan uang untuk membayar kos nya. Ada pula, Bapak Paijo seorang pedagang besi yang terpaksa mengandalkan penghasilan istrinya selama pasar besi ditutup dua minggu. Beliau memiliki istri yang mempunyai usaha toko kecil atau warung rumahan yang menjual beberapa kebutuhan sembako. Upaya-upaya yang dilakukan para pedagang ini tujuannya tidak lain adalah untuk bertahan hidup. Meskipun mereka wajib menaati peraturan yang ada, tapi disisi lain mereka juga harus tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun kebutuhan dasar setiap manusia itu berbeda-beda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun di Indonesia telah membawa banyak dampak dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan guna mencegah penyebaran virus ini agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Berbagai upaya tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi virus ini juga banyak, meskipun hasilnya memang belum bisa dikatakan maksimal atau membuat virus ini hilang. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, telah dilakukan. Setiap kebijakan yang dibuat sudah pasti berdampak pada masyarakat, baik berdampak positif maupun negatif. Sama halnya dengan PPKM Darurat yang berdampak pada para pedagang besi tua di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Terjadinya gelombang kedua (second wave) penyebaran virus Covid-19 menjadi penyebab adanya kebijakan ini. Sesuai aturan pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang mengatakan bahwa kebutuhan Non Esensial (bukan kebutuhan pokok) dilakukan sistem WFH (Work From Home) atau bekerja dari rumah, membuat para pedagang besi tua ini tidak dapat berdagang di dalam kios mereka selama dua minggu. Alhasil mereka tidak bisa

berdagang di kios mereka dan berjualan lewat online dengan pelanggan mereka. Hal ini sangat berdampak pada para pedagang besi tua ini yang mayoritas adalah tulang punggung di keluarga mereka. Akibat penutupan ini para pedagang besi tua mengalami penurunan omset rata-rata hampir 90%. Bahkan ada juga yang tidak mendapatkan penghasilan karena tidak memiliki handphone untuk berjualan online serta mereka yang rata-rata masih gaptek (gagap teknologi). Para pedagang besi ini harus mengatur strategi untuk tetap mendapatkan penghasilan, bahkan ada yang harus mengamen dan menjadi kuli angkut selama pasar besi ditutup. Hal ini dilakukan dalam untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Mereka harus tetap bekerja setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya seperti makan dan keperluan pokok lainnya. Karena para pedagang besi ini adalah para pekerja harian, yang penghasilannya tergantung apa yang ia dapatkan pada saat hari itu juga.

Dampak yang dirasakan paling besar oleh para pedagang besi tua ini adalah di sektor ekonomi dan sosial. Dampak sosial yang dirasakan para pedagang besi ini juga kompleks, terutama pada perubahan perilaku. Tuntutan untuk bekerja dari rumah memicu kebosanan dan kejenuhan yang memicu stress para pedagang besi ini. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa bekerja di dalam pasar, meskipun ada himbauan untuk melakukannya secara online, tapi tetap saja tidak semua pedagang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Hal ini wajar karena pada dasarnya Pasar Setono Betek ini adalah pasar tradisional yang mayoritas pedagangnya masih berdagang dengan sistem konvensional. Adanya sikap protes para pedagang besi apabila

penutupan pasar besi diperpanjang juga merupakan bentuk perubahan sikap dari para pedagang. Meskipun pada akhirnya penutupan pasar besi tidak diperpanjang.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti tentang Dampak PPKM Darurat terhadap komunitas pedagang besi di Pasar Setono Betek Kota Kediri adalah :

- 1) Dari segi aturan pelaksanaan PPKM Darurat, Pemerintah bisa mengkaji aturannya untuk lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terlebih kepada masyarakat pekerja harian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir dampak yang terjadi di masyarakat. Karena pada dasarnya tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan melalui WFH (*Work From Home*).
- 2) Dalam menentukan arah kebijakan selama pandemi Covid-19 prioritas Kesehatan memang lebih diutamakan daripada hal lain. Namun sebaiknya pemerintah juga melihat dari segi ekonomi dan sosial yang berdampak kepada masyarakat.
- 3) Untuk para pedagang besi akan lebih baik bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, jadi dapat memanfaatkan teknologi untuk berdagang dari rumah daripada berdagang secara konvensional. Perubahan jaman memang sudah canggih dan akan lebih baik jika kita bisa mengikuti arus perkembangannya dengan memanfaatkannya ke dalam hal-hal positif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azimah,R. N., Khasanah, I. N, Pratama,R ., Azizah, Z., Febriantoro, W., & Purnomo, S. R. S. (2020).’’Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri’’. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
- [2] Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, & Markhamah. (2020).’’Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona’’. *Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020*, 4, 156–164.
- [3] Debby D. V. Kawengian, & Joyce Jacinta Rares. (2015).’’Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pembarantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi’’. *E-Journal “Acta Diurna,” Vol.5*(Keywords: evaluasi proses, kebijakan anti trafficking, peningkatan kasus, rekomendasi), 10–11.
- [4] Ika Devi Pramudiana. (2017).’’Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat dari Pasar Tradisional ke Pasar’’. *Ekonomi, Vol.1 No.1*(Perilaku Konsumtif, Pasar Tradisional, Pasar Modern), 35–43.
- [5] Indra Lesemana Taddi, Gustaav B. Tampi, & Helly F.Kolondom. (2020). ‘’Pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengeloaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan’’. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–10.
- [6] Normajatun¹, A. H. (2020).’’Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin’’. *Jurnal Public Policy, Vol 5 No 2*(olicy Implementation, Plastic Bag, Traditional Markets), 55–63.
- [7] Sahbana, I. P., Pudjowati, J., & Wahyuni, S. T. (2021). ‘’Analisis Dampak Situasi Pandemi Covid-19 terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Larangan di Sidoarjo’’. *Bharanomics*, 2(1). <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.186>
- [8] Sahya,Anggara. (2018). ‘’Kebijakan Publik Pengantar Prof.Dr Hj Endang Soetari, AD. Msi.’’ Bandung: Pustaka Setia

Sumber lain :

- [1] <https://media.suara.com/files/2021/06/30/76669-ppkm-darurat-jawa-bali-intervensi-pemerintah-dalam-penanganan-covid-19.pdf> . Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 (2021).Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021
- [2] <https://mediaindonesia.com/ekonomi/301866/langkah-pemerintah-tangani-dampak-covid-19-sudah-tepat> . Diakses pada tanggal 23 Januari 2022
- [3] <https://www.kedirikota.go.id/> . Diakses pada tanggal 23 Januari 2022
- [4] <https://www.antaraneews.com/berita/2268602/pemerintah-cermati-dampak-ppkm-darurat-terhadap-ekonomi> . Diakses Pada tanggal 23 Januari 2022